

**DAMPAK PENILAIAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP
KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN
PADA PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA**

Skripsi

Telah disidangkan dan Dinyatakan lulus
Pada hari : Sabtu Tanggal : 10/10/2009

Eka Merdekawati
022105130

Menyetujui,

Dosen Penilai,



(Hj. Fazariah Mahruzar, MM.,Dra., Ak.)

Pembimbing,



(Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing



(Siti Maimunah, MSi., SE., Ak.)

MOTTO



"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(Al-Insyiroh.6-8)

*"Manusia pada hakikatnya mati,
kecuati orang yang berilmu.*

*Orang yang berilmu ibarat tidur,
kecuati orang yang mengamalkan ilmunya.*

*Orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu,
kecuati orang yang ikhlas..."*

(Al-Ghazali)

LEMBAR PERSEMBAHAN

III

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk:
Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mengasuh,
Mendidik, membesarkan dan mencurahkan kasih sayangnya,
kepada nanda hingga dewasa;*

ABSTRAK

EKA MERDEKAWATI. NPM 022105130. Dampak Penilaian Kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan Pada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Dibawah bimbingan: BUNTORO HERI PRASETYO DAN SITI MAIMUNAH.

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang sektor pelayanan umum yaitu bidang transportasi darat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perum PPD berdiri sejak tanggal 17 Juli 1981 yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan No. 1, Cawang Jakarta Timur.

Setiap perusahaan harus melakukan penilaian terhadap kinerja keuangannya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga pihak manajemen perusahaan bisa langsung melakukan perbaikan terhadap kinerja keuangannya. Apabila penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan baik maka kelangsungan hidup perusahaan juga akan baik. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Untuk kepentingan pembahasan tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel dengan alat ukur (indikator) untuk penilaian kinerja keuangan yaitu analisis rasio keuangan terhadap laporan laba/rugi dan neraca. Sedangkan untuk kelangsungan hidup perusahaan, indikator yang digunakan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang meliputi likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Aktivitas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis menentukan hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian Deskriptif Eksploratif, dengan metode penelitian studi kasus, dan teknik penelitiannya adalah kuantitatif (non statistik). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan taufik Allah jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Penilaian Kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan”. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan sampai pada umatnya hingga akhir zaman.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan support berbagai pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Kedua Orang tua dan adik-adikku tercinta yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa serta motivasi baik secara moral maupun material pada penulis.
2. Bapak Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Ibu Siti Maimunah, MSi., SE., Selaku Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.

7. Bapak Joko selaku Manajer Umum Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta yang telah membantu proses riset sehingga penyelesaian skripsi berjalan lancar.
8. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, yang turut membantu proses penyelesaian skripsi.
9. Sahabat-sahabatku Tri Hanipatun Nisaa, SE., Eni Zulianti. SE., dan Sofi Apriyanti. SS., serta rekan seperjuanganku Tuti Herawati, SE., yang selalu memberikan motivasi, masukan dan doa kepada penulis.
10. Riyad Solihin, Sp., yang selalu memberikan perhatian, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Crew cd20 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-temanku angkatan 2005 Akuntansi khususnya kelas C yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini hanya merupakan karya kecil dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan untuk mahasiswa lain pada umumnya.

Bogor, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran.....	5
1.5.2. Paradigma Penelitian.....	10
1.6. Hipotesis Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penilaian Kinerja Keuangan.....	12
2.1.1. Pengertian Penilaian Kinerja Keuangan.....	12
2.1.2. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan.....	13
2.2. Analisis Laporan Keuangan.....	14
2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan.....	14
2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan.....	15
2.2.3. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan.....	16
2.2.4. Tahap-tahap Analisis Laporan Keuangan.....	19
2.3. Rasio Keuangan.....	20
2.3.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan.....	20
2.3.2. Keunggulan Analisis Rasio.....	21
2.3.3. Keterbatasan Analisis Rasio.....	22
2.3.4. Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	23
2.4. Kelangsungan Hidup Perusahaan.....	27
2.4.1. Pengertian Kelangsungan Hidup Perusahaan.....	27
2.4.2. Aspek Penilaian Kelangsungan Hidup Perusahaan.....	28
2.5. Dampak Penilaian Kinerja keuangan terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan.....	32
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian.....	34
3.2. Metode Penelitian.....	34
3.2.1. Desain Penelitian.....	34
3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	37

3.2.3. Metode Penarikan Sampel.....	38
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
3.2.5. Metode Analisis.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	42
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang.....	43
4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan.....	52
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian.....	53
4.2.1. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta.....	53
4.2.2.1. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan Menggunakan Time Series Analysis.....	54
4.2.2.2. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan Menggunakan Cross- Sectional Analysis.....	66
4.2.2. Dampak Penilaian Kinerja Keuangan terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	80
5.2. Saran.....	82
JADWAL PENELITIAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.....	8
Tabel 2. Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan.....	30
Tabel 3. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infra (Aspek Keuangan).....	31
Tabel 4. Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel 5. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infra (Aspek Keuangan).....	41
Tabel 6. Cash Ratio Perum PPD Tahun 2004-2006.....	55
Tabel 7. Current Ratio Perum PPD Tahun 2004-2006.....	56
Tabel 8. Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Perum PPD Tahun 2004- 2006.....	57
Tabel 9. Return on Equity Perum PPD Tahun 2004-2006.....	59
Tabel 10. Return on Investment Perum PPD Tahun 2004-2006.....	59
Tabel 11. Collection Periods Perum PPD Tahun 2004-2006.....	60
Tabel 12. Perputaran Persediaan Perum PPD Tahun 2004-2006.....	61
Tabel 13. Total Asset Turn Over Perum PPD Tahun 2004-2006.....	62
Tabel 14. Kinerja Keuangan Perum PPD Relatif Terhadap BUMN Sejenis.....	67
Tabel 15. Total Skoring.....	69
Tabel 16. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup Perum PPD 31 Desember 2004.....	71
Tabel 17. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup Perum PPD 31 Desember 2005.....	73
Tabel 18. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup Perum PPD 31 Desember 2006.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Paradigma Penelitian.....	10
Gambar 2.	Grafik Perkembangan Rasio Keuangan Perum PPD Periode 2004 s.d. 2006.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan**
- Lampiran 2. Surat Keterangan Riset**
- Lampiran 3. Struktur Organisasi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)**
- Lampiran 4. Neraca Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta Periode 2004 s.d. 2006**
- Lampiran 5. Laporan Laba Rugi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta Periode 2004 s.d. 2006**
- Lampiran 6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan perusahaan dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan, pada saat tertentu, prestasi operasi dalam suatu rentang tertentu, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik kepada *stakeholder* maupun *shareholder* guna menghasilkan suatu keputusan yang rasional.

Laporan keuangan disebut sebagai "kartu skor" periodik yang memuat hasil investasi operasi dan pembiayaan perusahaan, maka fokus akan diarahkan pada hubungan dan indikator keuangan yang memungkinkan analisa penilaian kinerja masa lalu dan juga proyeksi hasil masa depan dimana akan menekankan pada manfaat serta keterbatasan yang terkandung didalamnya.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan, diperlukan suatu alat yang dinamakan analisa laporan keuangan. Laporan keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah laporan laba rugi dan neraca. Kedua laporan keuangan tersebut dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan.

Setiap analisis keuangan dapat merumuskan rasio tertentu yang dianggap mencerminkan aspek tertentu. Pemilihan aspek-aspek yang akan dinilai perlu dikaitkan dengan tujuan analisis. Apabila analisis dilakukan oleh

pihak kreditur, aspek yang dinilai akan berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh calon pemodal/ investor. Kreditor akan lebih berkepentingan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan sedangkan calon pemodal yang biasa dikenal dengan investor ekuitas akan melihat dari dua sisi risiko dan potensi karena investor ekuitas dipengaruhi oleh seluruh aspek kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, kebutuhan analisis mereka paling banyak dan komprehensif. Adapun aspek-aspek yang dinilai diklasifikasikan menjadi aspek likuiditas, aspek leverage atau solvabilitas, aspek aktivitas, aspek profitabilitas dan penilaian pasar.

Pada umumnya digunakan dua cara untuk menafsirkan rasio-rasio keuangan. Dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu dan sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain (kalau ternyata berbeda, maka analisis keuangan perlu melakukan penyesuaian), maka rasio-rasio keuangan yang dihitung dapat ditafsirkan dengan membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan pada periode sebelumnya dan dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan lain yang sejenis.

Dengan demikian kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai baik apabila perusahaan tersebut mampu meningkatkan prestasinya dari tahun ke tahun dan mampu bersaing dengan kompetitor dari jenis industri yang sama. Kinerja perusahaan yang baik akan memudahkan para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Keputusan yang tepat dapat memberikan kelangsungan hidup yang baik bagi perusahaan. Kelangsungan hidup merupakan kemampuan suatu

perusahaan untuk tetap bertahan dan dapat menjalankan operasi perusahaanya secara terus menerus (going concern).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “Dampak Penilaian Kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan Pada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan terus merugi dari tahun ke tahun yang disebabkan tidak adanya tindak lanjut terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga mengakibatkan kelangsungan hidup Perum PPD terancam.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja keuangan pada Perum PPD?
2. Bagaimana kondisi kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD?
3. Bagaimana dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD, sebagai dasar penyusunan

makalah yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Mata Kuliah Skripsi Akuntansi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja keuangan pada Perum PPD.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD?

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang perbandingan antara teori dan aplikasi dalam masyarakat, khususnya mengenai dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

b. Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, terutama mengenai bagaimana dampak penilaian kinerja keuangan

terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD, serta dapat dijadikan suatu gambaran bagi peneliti lain dalam penulisan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran sebagai bahan masukan kepada manajemen khususnya mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis rasio keuangan berarti kita menggali lebih lanjut informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan merupakan hasil akhir dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan selama satu periode yang nantinya digunakan sebagai media informasi bagi setiap bagian perusahaan (*management, stakeholders dan shareholders*) sehingga dapat mengetahui kondisi keuangan dan kinerja pada perusahaan tersebut.

Analisa terhadap laporan keuangan dimaksudkan agar data keuangan tersebut dapat lebih berarti dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak ekstern yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Analisa tersebut biasanya berupa perhitungan rasio-rasio untuk menilai kondisi keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Analisa dengan menggunakan rasio sangat umum

shareholder, maupun *stakeholder*. Adapun Rasio yang di pakai untuk menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN adalah:

1. Likuiditas
 - *Cash Ratio*
 - *Acid Test Ratio*
2. Profitabilitas
 - *Return on Investment (ROI)*
 - *Return on Equity (ROE)*
3. Aktivitas
 - *Inventory Turn Over*
 - *Total Asset Turn Over(TATO)*
 - *Collection Period*
4. Solvabilitas
 - Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/ Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep.215/M-BUMN/1999, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan penilaian tersebut, setiap BUMN dapat mengetahui prestasi yang telah dicapainya, dan mengetahui posisi BUMN satu dengan BUMN lain sebagai kompetitornya.

Tabel 1
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Kategori	Predikat	Total Skor (TS)
SEHAT	AAA	TS>95
	AA	80<TS≤95
	A	65<TS≤80
KURANG SEHAT	BBB	50<TS≤65
	BB	40<TS≤50
	B	30<TS≤40
TIDAK SEHAT	CCC	20<TS≤30
	CC	10<TS≤20
	C	TS≤10

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

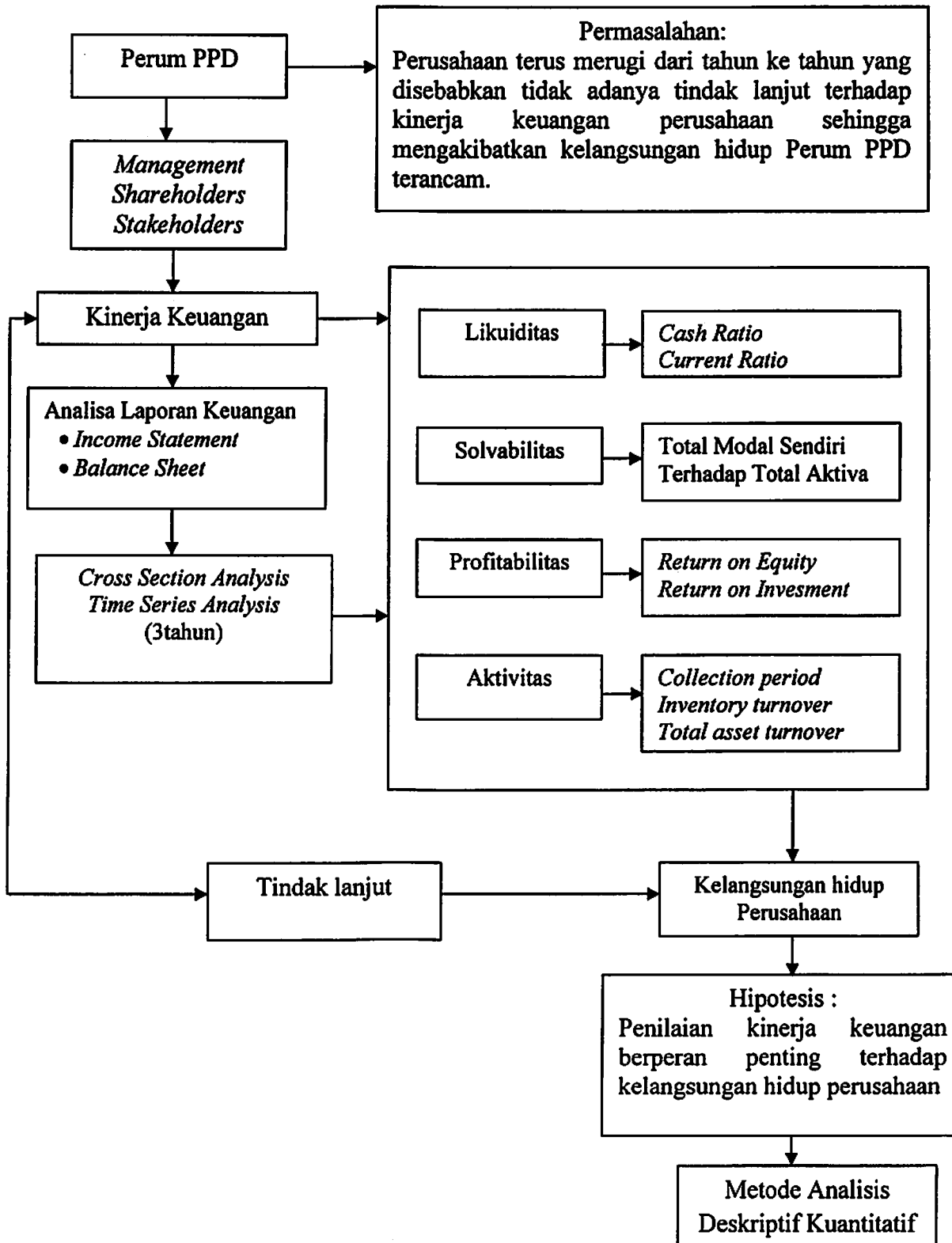
Mengingat bahwa suatu rasio bisa bermanfaat apabila diinterpretasikan dalam perbandingan baik dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya maupun rasio pesaing. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan *comparative analysis* atau dikenal juga dengan *cross-section analysis* dan *trend analysis* yang biasanya disebut analisis *time series*.

Standar rasio keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan standar yang digunakan untuk menentukan baik tidaknya kelangsungan hidup Perum PPD.

Apabila pelaksanaan penilaian kinerja keuangan tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Karena dengan adanya penilaian kinerja keuangan kita dapat mengetahui pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu dan

mengetahui keberhasilan (sehat tidaknya) suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami pertumbuhan yang tidak sehat dan tidak adanya penilaian kinerja maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut dapat terancam.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara dari permasalahan. Untuk itu diperlukan pengujian yang lebih lanjut dari permasalahan yang diteliti.

Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja keuangan Perum PPD tidak baik
2. Kelangsungan hidup perusahaan Perum PPD tidak sehat
3. Penilaian kinerja keuangan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum PPD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penilaian Kinerja Keuangan

2.1.1. Pengertian Penilaian Kinerja Keuangan

Darsono dan Ashari (2005, 51) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penilaian kinerja keuangan adalah “Suatu analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan baik perbandingan secara internal maupun eksternal”.

Rico Lesmana dan Rudi Surjanto (2004, 11) menyatakan bahwa “penilaian kinerja keuangan merupakan penilaian yang dilakukan untuk evaluasi kinerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut”.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan merupakan suatu analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan baik perbandingan secara internal maupun eksternal sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

2.1.2. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan

Penilaian kinerja keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting. Berdasarkan penilaian tersebut perusahaan bisa mengetahui tingkat keberhasilan selama satu periode tertentu. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan hasil penilaian itu sebagai pedoman bagi usaha perbaikan maupun peningkatan untuk periode selanjutnya. (G. Sugiyarso dan F. Winarni, 2005, 111)

Weaver dan Weston (2004, 201) memaparkan bahwa perencanaan dan pengendalian yang efektif sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan. Rencana keuangan dapat bermacam-macam bentuknya, tetapi rencana yang baik adalah rencana yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini. Kekuatan perusahaan harus terlebih dahulu dikenali dan dipahami agar dapat dieksploitasi, dan kelemahan juga harus dikenali agar tindakan korektif dapat diambil.

Dari pengertian diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari penilaian kinerja keuangan adalah hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi usaha perbaikan maupun peningkatan untuk periode selanjutnya serta untuk mengenali kekuatan dan kelemahan agar tindakan korektif dapat diambil.

2.2. Analisis Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam beberapa bidang yang penting, termasuk kemampuan menghasilkan laba, efisiensi, dan resiko. Analisis data historis yang dilakukan bertujuan memberikan gambaran tentang kinerja manajemen di masa yang lalu dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki kinerja manajemen di masa yang akan datang.

Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) dilakukan agar informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut menjadi lebih bermakna bagi keperluan dari pemakai laporan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Analisis laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada di antara unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur sama tahun yang lalu atau jangka pembanding lain serta menjelaskan sebab perubahannya. (Charles T. Hongren, et al, 2006, 259).

Sedangkan menurut Lukman Syamsudin (2004, 37) analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang meneliti

dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan.

Adapun Laporan keuangan perusahaan yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari lima, yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas; dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari kelima laporan keuangan tersebut, hanya dua jenis laporan yang umumnya digunakan dalam perhitungan rasio yaitu laporan laba rugi dan neraca.

Lukas Setia Atmaja mengungkapkan bahwa rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan pada satu tahun saja tidak akan memberikan informasi yang memadai. Untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, kita dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri (*comparative analysis*) dan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu (*trend analysis*).

Pada dasarnya jenis rasio keuangan yang dipergunakan dalam menganalisis laporan keuangan tergantung pada aspek-aspek informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai baik *management*,

hubungan yang ada di antara unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur sama tahun yang lalu untuk menilai keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan yang berguna untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983) sebagaimana dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2007, 18) adalah sebagai berikut:

1. Screening

Dengan dilakukannya analisis laporan keuangan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat mengetahui situasi dan kondisi tanpa harus pergi ke lapangan.

2. Understanding

Melalui analisis laporan keuangan diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan akan dapat memahami permasalahan yang ada di perusahaan, baik yang mengenai kondisi keuangan, maupun hasil usahanya.

3. Forecasting

Dengan melalui perbandingan terhadap laporan keuangan yang disusun dari waktu ke waktu secara berkala maka perusahaan akan dapat meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

4. *Diagnosis*

Dengan analisis laporan keuangan maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan.

5. *Evaluation*

Dengan melalui analisis laporan keuangan yang menunjukkan kondisi dan situasi perusahaan maka dapat dilakukan penilaian terhadap prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.2.3. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Pada umumnya metode analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Analisis Horizontal

Analisis horizontal adalah analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan. (Jumingan, 2006, 44). Analisis horizontal merupakan analisis persentase peningkatan dan penurunan yang berhubungan dengan pos-pos dalam laporan keuangan komparatif. Jumlah setiap pos pada laporan keuangan tahun terakhir dibandingkan dengan pos terkait pada satu atau lebih laporan sebelumnya. (Carll S. Warren, et al, 2006, 299).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis horizontal adalah analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun dengan menggunakan persentasi peningkatan dan penurunan yang berhubungan dengan pos-pos dalam laporan keuangan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2. Analisis Vertikal

Analisis vertikal adalah analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja, misalnya berupa analisis rasio. (Jumingan, 2006, 44). Analisis vertikal adalah analisis persentasi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan setiap komponen dengan total dalam laporan tunggal atau hanya terbatas untuk laporan individual. Misalnya, setiap pos aktiva dinyatakan sebagai persentasi dari total aktiva. (Carll S. Warren, et al, 2006, 301). Jadi analisis vertikal merupakan analisis laporan keuangan yang terbatas untuk laporan individual atau satu periode akuntansi saja.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007, 216) ada beberapa teknik analisis laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Komparatif

Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka laporan keuangan lainnya.

2. Trend Analisis

Analisis ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan dari sini digambarkan trennya. Trend analisis ini biasanya dibuat melalui grafik. Untuk itu perlu dibantu oleh pengetahuan statistic misalnya menggunakan *linear programming*, rumus *chi square*, rumus $y=a+bx$

3. Laporan Keuangan *Common Size* (Laporan Bentuk Awam)

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasa dikalikan dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya asset untuk neraca, penjualan untuk laba rugi.

4. Metode Indeks *Time Series*

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengonversikan angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini, dibuat indeks tahun-tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode lain.

5. Analisis Rasio

Adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Misalnya antara pos penjualan dengan biaya penjualan memiliki hubungan signifikan.

6. Teknik Analisis lain, seperti:

- Analisis Sumber dan Penggunaan Dana

- Analisis *Break Even*
- Analisis *Gross Profit*
- *Du Pont Analysis*

7. *Analytical review/Transactional Analysis*

Teknik ini dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan cara melihat hubungan antara satu pos dengan pos lainnya dilihat secara rasional. Misalnya dapat dianalisis jika ada pengecatan gedung pasti biaya kantor atau biaya pemeliharaan gedung naik.

8. Model Analisis:

- *Bond Rating*
- *Bankruptcy model*
- *Net cash flow prediction model*
- *Take Over Model*

2.2.4. Tahap-tahap Analisis Laporan Keuangan

Fraser dan Ormiston (2004,191) memaparkan bahwa tahap-tahap analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tentukan tujuan analisis;
2. Pelajari industri di mana perusahaan itu bergerak dan tentang proyeksi perkembangan ekonominya;
3. Pahami pengetahuan tentang perusahaan dan kualitas manajemennya;
4. Evaluasi laporan keuangan
 Alat: Bentuk umum laporan keuangan, rasio-rasio yang penting, analisis tren, dan perbandingan dengan industri lain.
 Bidang Utama: Likuiditas, solvabilitas, efisiensi dan laba usaha, rasio pasar.

5. Ikhtisarkan kesemuanya berdasarkan analisis itu, dan ambil kesimpulan berkenaan dengan sasaran yang ditentukan.

2.3. Analisis Rasio Keuangan

2.3.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam suatu laporan keuangan. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio, maka akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada analis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat mengintrepretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Agnes Sawir, 2005, 6). Rasio keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2007, 297) adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz, JR. (2005, 202), "Rasio keuangan adalah sebuah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya".

Dari pengertian tersebut, maka analisis rasio keuangan dapat diartikan sebagai suatu alat analisa untuk menilai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan antar pos

keuangan yang satu dengan yang lainnya yang menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.

Menurut Dewi Astuti (2004, 30) ada tiga tipe perbandingan hasil analisis rasio keuangan, yaitu :

1. Analisis *cross-sectional*

Analisis *cross-sectional* adalah membandingkan hasil analisis rasio keuangan suatu perusahaan dengan nilai analisis keuangan perusahaan sejenis dalam industri yang sama dalam waktu yang sama. Biasanya yang menjadi perusahaan pembanding adalah perusahaan idolanya atau perusahaan pesaing, atau bisa juga hasil analisis rasio keuangan perusahaan dibandingkan dengan nilai rasio keuangan rata-rata industri.

2. Analisis *time-series*

Analisis *time-series* adalah mengevaluasi kinerja perusahaan dengan hasil analisis rasio keuangan pada periode yang lain dalam perusahaan yang sama.

3. Analisis gabungan

Analisis gabungan adalah gabungan antara analisis *cross-sectional* dan analisis *time-series*.

2.3.2. Keunggulan Analisis Rasio

Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut (Sofyan Syafri Harahap, 2007, 298) adalah :

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan;
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;
3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi (*Z-score*);
5. Menstandarisir *size* perusahaan;
6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau "*time series*";
7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang;

2.3.3. Keterbatasan Analisis Rasio

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini antara lain (Agnes Sawir, 2004, 44) adalah :

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha.
2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi.
3. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan.
4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan perkiraan.

Namun walaupun demikian, analisis rasio tetap merupakan alat yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam membantu kita mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. (Agnes Sawir, 2004, 45).

2.3.4. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Berikut ini adalah jenis rasio keuangan yang dikemukakan oleh Lukas Setia Atmaja (2008, 415).

Rasio Keuangan di desain untuk memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi). Ada 5 Jenis Rasio Keuangan :

1. *Leverage Ratios*, memperlihatkan berapa hutang yang digunakan perusahaan.
2. *Liquidity Ratios*, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.
3. *Efficiency* atau *Turnover* atau *Asset Management Ratios*, mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivitya.
4. *Profitability Ratios*, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba.
5. *Market-Value Ratios*, memperlihatkan bagaimana perusahaan dinilai oleh investor di pasar modal.

Pada dasarnya jenis rasio keuangan yang dipergunakan dalam menganalisis laporan keuangan tergantung pada aspek-aspek informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai baik *management*, *shareholder*, maupun *stakeholder*. Berikut adalah beberapa jenis rasio sesuai dengan yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka

pendeknya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kekayaan dalam hal ini aktiva lancar yang dengan mudah dapat digunakan untuk membayar kewajiban yaitu utang lancar.

▪ *Current Ratio*

Rasio lancar adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin utang kepada kreditor jangka pendek. Semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin utang-utang perusahaan kepada kreditor.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

(Toto Prihadi, 2007, 117-119)

▪ *Acid Test Ratio/Quick Ratio*

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik.

$$\text{Acid Test Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga} + \text{Piutang Usaha}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

(Sofyan Syafri Harahap, 2007, 303)

2. Struktur Modal dan Solvabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. (Sofyan Syafri Harahap, 2007, 303).

- *Total Debt To Total Equity Ratio*

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang dengan modal. Rasio satu menunjukkan jumlah utang sama dengan modal. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi risiko kebangkrutan perusahaan.

$$\text{Total Debt To Total Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

(Toto Prihadi, 2007, 124)

- *Debt to Total Asset Ratio*

Rasio ini menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset perusahaan.

$$\text{Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Assets}}$$

(Arthur J. Keown, et al, 2004, 80)

3. Rasio Profitabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. (Sofyan Syafri Harahap, 2007, 304)

- *Return on Asset (ROA)*

Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh *asset* yang digunakan dalam menghasilkan laba, dalam hal ini EBIT (*earning before interest taxes*).

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

- *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang diperoleh dari penanaman modalnya.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Stockholder' Equity}}$$

(Toto Prihadi, 2007, 120-123)

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini juga disebut sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivitya atau mengukur bagaimana perusahaan menggunakan aktivitya.

- *Receivable Turnover*

Memberikan pandangan mengenai kualitas piutang perusahaan dan seberapa berhasilnya perusahaan dalam penagihannya.

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Piutang}}$$

- *Inventory Turnover*

Digunakan agar dapat membantu menentukan seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola persediaan dan juga untuk mendapatkan indikasi likuiditas persediaan.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

(Van Horne dan Wachowicz, JR., 2005, 212 -216)

- *Total Asset Turnover*

Menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola neraca perusahaan-aktiva-yang ditunjukkan oleh jumlah hasil penjualan per satu dolar.

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

(Arthur J. Keown, et al, 2004, 78)

2.4. Kelangsungan Hidup Perusahaan

2.4.1. Pengertian Kelangsungan Hidup Perusahaan

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, salah satu asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah kelangsungan usaha (*going concern*) yang berarti "perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya di masa depan. Ini berarti bahwa perusahaan

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya”.

Kelangsungan hidup perusahaan juga dinilai sesuai dengan salah satu postulat akuntansi, yaitu *going concern* yang disebut juga *continuity*. Postulat ini menganggap bahwa perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan dianggap tidak akan berhenti, ditutup/dilikuidasi di masa yang akan datang. (Sofyan Syafri Harahap, 2008, 68)

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dinilai sesuai dengan salah satu postulat akuntansi yaitu *going concern* yang berarti perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan akan tetap melakukan usahanya di masa depan.

2.4.2. Aspek Penilaian Kelangsungan Hidup Perusahaan

Ditinjau dari segi manajemen keuangan, kinerja keuangan perusahaan yang menjadi aspek penilaian dalam kelangsungan hidup perusahaan dapat dinilai dengan empat tolak ukur, yaitu:

1. Kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo dari dana intern, tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan (likuiditas).

2. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas).
 3. Kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan harta yang mereka miliki (aktivitas/ efektifitas pengoperasian harta).
 4. Kemampuan perusahaan dalam menyusun struktur pendanaan yang efisien antara modal sendiri dengan pinjaman (solvabilitas).
- (Siswanto Sutojo dan F. Kleinsteuber, 2004, 13)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penilaian tingkat kesehatan BUMN ini hanya diterapkan bagi BUMN yang mendapat opini auditor (baik oleh Kantor Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dengan hasil “Wajar Tanpa Pengecualian” atau “Wajar Dengan Pengecualian”.

Aspek-aspek yang dinilai dalam tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbagi menjadi tiga kategori penilaian, yaitu:

1. Aspek Keuangan
2. Aspek Operasional
3. Aspek Administrasi

Untuk tingkat kesehatan keuangan saja atas suatu perusahaan, cukup aspek keuangan yang menjadi indikatornya. Berikut adalah daftar indikator dengan bobotnya untuk penilaian aspek keuangan:

Tabel 2
Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

No.	Indikator	Bobot	
		Infra	Non Infra
1.	Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)	15	20
2.	Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3.	Rasio Kas	3	5
4.	Rasio Lancar	4	5
5.	<i>Collection Periods</i>	4	5
6.	Perputaran Persediaan	4	5
7.	Perputaran Total Asset	4	5
8.	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	6	10
	Total Bobot	50	70

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Setiap bobot diakumulasikan untuk mengetahui totalnya. Total bobot itulah yang dapat menentukan bagaimana tingkat kesehatan perusahaan dan sekaligus kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Berikut ini adalah penilaian tingkat kesehatan BUMN dengan total bobot aspek keuangan BUMN infra struktur yaitu 50%.

Tabel 3
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infra
(Aspek Keuangan)

Kategori	Predikat	Total Skor (TS)
SEHAT	AAA	$TS > 47,5$
	AA	$40 < TS \leq 47,5$
	A	$32,5 < TS \leq 40$
KURANG SEHAT	BBB	$25 < TS \leq 32,5$
	BB	$20 < TS \leq 25$
	B	$15 < TS \leq 20$
TIDAK SEHAT	CCC	$10 < TS \leq 15$
	CC	$5 < TS \leq 10$
	C	$TS \leq 5$

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002
 (data diolah penulis)

Dengan demikian aspek yang digunakan untuk penilaian kelangsungan hidup perusahaan dapat dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Adapun standar rasio keuangan yang dijadikan tolak ukur adalah standar rasio yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

2.5. Dampak Penilaian kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan

Suatu perusahaan pasti berkeinginan untuk mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan usahanya maka harus ada suatu peningkatan nilai perusahaan. Melalui kegiatan operasional, perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan pokoknya yaitu menghasilkan nilai perusahaan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat baik buruknya kinerja keuangan (tingkat kesehatan perusahaan) dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Dari kekuatan dan kelemahan tersebut, pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap kinerja keuangan serta mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan.

Kelangsungan hidup perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan hidupnya. Kelangsungan hidup perusahaan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu. Adapun aspek penilaian kelangsungan hidup perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha milik Negara Nomor KEP/100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN dari segi keuangannya, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui bagaimana kelangsungan hidup perusahaan, maka dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan karena dengan melakukan penilaian terhadap kinerja

keuangan serta adanya tindak lanjut dari penilaian tersebut maka akan mempunyai dampak yang positif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Penulis melakukan penelitian mengenai dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian ini bersumber pada data-data dan informasi mengenai keuangan pada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi khususnya darat di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Adapun waktu penelitian yang telah ditempuh penulis yaitu dari tanggal 7 September 2009 sampai 11 September 2009.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu proses yang diperlukan dalam perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian yang mencakup:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif eksploratif yaitu menyangkut suatu pernyataan bahwa penulis mendapatkan data-data dari perusahaan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dibahas yaitu dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan, menguraikan, meneliti dan menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, kemudian menarik simpulan dari objek yang diteliti.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter/ciri-ciri utama dari kasus yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum mengenai dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah non statistik komparatif, yaitu suatu teknik penelitian dengan membandingkan data-data rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dan membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan elemen yang terpenting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis organization, yaitu pada bagian keuangan di Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 4

Dampak Penilaian Kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan

N O	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	Penilaian Kinerja Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Rasio Keuangan • Tipe Perbandingan Rasio Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas • Solvabilitas • Profitabilitas • Aktivitas • <i>Time Series Analysis</i> • <i>Cross Section Analysis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cash Ratio</i> • <i>Current Ratio</i> • Total Modal Sediri Terhadap Total Aktiva • <i>Return on Asset</i> • <i>Return on Equity</i> • <i>Collection period</i> • <i>Inventory Turnover</i> • <i>Total Asset Turnover</i> • <i>Trend</i> Perolehan Rasio keuangan dari tahun 2004-2006 • Rasio keuangan BUMN sejenis untuk tahun yang sama 	Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio
2.	Kelangsungan Hidup Perusahaan	Kinerja Keuangan	SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Kesehatan BUMN	Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Hal ini dikarenakan penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data yang diambil. Meskipun tidak menggunakan metode penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Data yang dimaksud adalah laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi periode 31 Desember 2004-31 Desember 2006) Perum PPD dan laporan keuangan BUMN sejenis, serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan makalah skripsi ini, dilakukan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*Library research*)

Dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk dijadikan landasan teoritis yang akan dikaitkan dengan masalah yang diteliti, dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori, literatur-literatur, dan bahan bacaan lain.

2. Riset Lapangan (*Field research*)

Dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan yang menjadi lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perusahaan secara keseluruhan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Meninjau secara langsung ke perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

3.2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan membandingkan antara keadaan objek penelitian yang sebenarnya melalui pengumpulan data relevan yang tersedia dengan standar yang seharusnya. Data tersebut disusun, dipelajari, dan dianalisa lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus sebagai alat analisis.

➤ Analisis Rasio Keuangan

Untuk analisis rasio ini, digunakan rasio standar yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 sebagai tolak ukur mengevaluasi kelangsungan hidup perusahaan yang diambil dari komponen-komponen keuangan yang terkandung dalam Neraca dan Laporan Laba/Rugi. Berikut adalah rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan keuangan BUMN Non Jasa Keuangan:

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return On Equity* (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. Imbalan Investasi/*Return On Investment* (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas/*Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jk. Pendek}}{\text{Current Liabilities}}$$

d. Rasio Lancar/*Current Ratio*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

e. *Collection Periods* (CP)

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

f. Perputaran Persediaan (PP)/*Inventory Turn Over*

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

g. Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Adapun ukuran yang digunakan untuk evaluasi kelangsungan hidup perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangannya. Berikut ini adalah penilaian tingkat kesehatan BUMN dengan total bobot aspek keuangan BUMN Infra struktur yaitu 50%.

Tabel 5
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Infra
(Aspek Keuangan)

Kategori	Predikat	Total Skor (TS)
SEHAT	AAA	$TS > 47,5$
	AA	$40 < TS \leq 47,5$
	A	$32,5 < TS \leq 40$
KURANG SEHAT	BBB	$25 < TS \leq 32,5$
	BB	$20 < TS \leq 25$
	B	$15 < TS \leq 20$
TIDAK SEHAT	CCC	$10 < TS \leq 15$
	CC	$5 < TS \leq 10$
	C	$TS \leq 5$

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002
(data diolah penulis)

Dari hasil perhitungan rasio keuangan maka dapat ditentukan apakah perusahaan berada dalam kategori sehat, kurang sehat, maupun tidak sehat sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat dapat diketahui.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) telah berdiri sejak tahun 1920. Perusahaan bekas peninggalan Jepang ini merupakan penggabungan alat transportasi milik *Nederlansch Indische Tram Maatschappij* dengan *Bataviach Elektrische Tram Maatschappij* dengan nama *Bataviache Verkeers Maatschappij* (BVMNV) yang kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 205 tahun 1961 di bawah naungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Pengelolaan PN PPD dialihkan ke Pemerintah Pusat cq. Departemen Perhubungan sejak tanggal 17 Juli 1981. Berdasarkan PP No. 24 tahun 1981, telah ditetapkan perubahan Status Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) menjadi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Kantor pusatnya berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur.

Perum PPD pernah menjadi raja angkutan umum di Jakarta, namun hanya bertahan hingga pertengahan tahun 1980-an. Tepatnya pada tahun 1985, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan

No.KM.262/Aj.004.Phb-84 tanggal 31 Desember 1984, Perum PPD kemudian bergabung dengan tujuh perusahaan bus kota swasta dengan tujuan menyerahkan seluruh kekayaan negara yang berasal dari bus-swasta kepada Perum PPD sebagai tambahan penyertaan modal pemerintah.

Berawal dari tahun 1981 sampai sekarang perkembangan Perusahaan dari tahun ke tahun selalu memburuk, hal ini ditandai dengan semakin besarnya kerugian yang diderita perusahaan, terlebih sejak tahun 2002 perusahaan tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah, untuk mengurangi beban kerugian perusahaan telah menjual asset-asset yang dimilikinya. Walaupun Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta mengalami kesulitan keuangan yang sangat besar sehingga kelangsungan hidupnya terancam akan tetapi pemerintah tetap mempertahankannya karena pasalnya Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta masih memiliki potensi untuk tetap berkembang. Selanjutnya PPD akan berusaha mengembangkan bisnisnya, yakni dengan tidak hanya beroperasi di Jakarta saja, selain itu, perusahaan akan memasuki bisnis bus di daerah perumahan juga.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Struktur organisasi merupakan kerangka dari organisasi yang menggambarkan suatu hubungan struktural yang terdapat dalam suatu organisasi. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan operasi perusahaan tersebut.

Pembagian tugas diadakan karena adanya ragam pekerjaan dalam setiap bagian, sehingga diharapkan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan yang baik antar bagian-bagian yang ada dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan perusahaan.

Berikut dijelaskan uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan sesuai dengan struktur organisasi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta.

1. Direksi

Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:

- a. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
- b. Menguasai, mengadakan, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
- c. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan;
- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri Keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

- g. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
- h. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- j. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menetapkan gaji, pensiun/ jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berlaku;
- m. Memberikan bahan-bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menetapkan kebijaksanaan atau keputusan direksi;
- n. Bertindak atas nama Direksi untuk bidangnya masing-masing;
- o. Disamping tugasnya sebagai anggota Direksi, masing-masing Direktur bertugas memimpin keseluruhan kegiatan tata laksana Direktorat yang dipimpinnya;
- p. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing Direktur wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Direksi;

2. Direktorat Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan jasa angkutan penumpang dengan bus, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan bus, pengadaan dan penghapusan barang-barang teknik, alat dan peralatan penunjang teknik dan bangunan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan.

Direktorat Usaha Terdiri dari:

a. Manajer Operasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program operasi, data produksi jasa angkutan, penyelesaian masalah kecelakaan, serta pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Manajer Operasi terdiri dari:

- 1) Divisi Trayek, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pengaturan lintas menurut jalur pengoperasian bus, pengoperasian bus lintas secara optimal berdasarkan kebutuhan pasar dari masing-masing segmen pelayanan, pengoperasian bus wisata dan angkutan khusus, pengaturan produksi dan biaya operasi angkutan bus, kegiatan pemasaran usaha, serta melakukan urusan tata usaha Direktorat.
- 2) Divisi Ketertiban Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengaturan pengamanan dan ketertiban operasi, penyelesaian masalah-

masalah kecelakaan/ ganti rugi akibat operasi bus, serta pengaturan dan pemantauan kegiatan operasional bus dengan sarana komunikasi radio.

b. Manajer Teknik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan pengadaan, penyaluran dan penggunaan bekal teknik, alat dan peralatan penunjang teknik, bus dan kendaraan pertolongan teknik sesuai kebutuhan, pemberian bimbingan teknik, pengendalian dan penyusunan sistem pemeliharaan dan perbaikan bus, kendaraan pertolongan teknik, serta administrasi penghapusan. Manajer teknik terdiri dari:

- 1) Divisi Pemeliharaan dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, penggunaan bekal teknik, alat dan peralatan penunjang teknik, bus dan kendaraan pertolongan teknik sesuai kebutuhan Direktorat-direktorat, penyiapan pembinaan pemeliharaan dan pertolongan teknik, serta pelaksanaan administrasi penghapusan.
- 2) Divisi Pengadaan dan Bina Barang Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan kebutuhan, penyaluran dan penggunaan bekal teknik, alat dan peralatan penunjang teknik, bus dan kendaraan pertolongan teknik

sesuai kebutuhan Direktorat-direktorat, serta pembinaan dan pengaturan penggunaan bekal teknik.

3. Direktorat Administrasi dan Keuangan

Direktorat Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kepangkatan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan, mutasi dan pemberhentian pegawai, kesejahteraan dan penggajian pegawai, kegiatan hukum, organisasi dan tata laksana, kehumasan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan perusahaan, serta pelaksanaan administrasi keuangan, dan perbendaharaan perusahaan sesuai kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan.

Direktorat Administrasi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Manajer Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan pegawai, pengangkatan, kepangkatan dan pemberhentian, mutasi, kesejahteraan dan penggajian pegawai, serta penanganan masalah hukum, organisasi dan tata laksana, pengadaan bekal umum, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Manajer Umum terdiri dari:

- 1) Divisi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan dan pendidikan dan

pelatihan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, dan mutasi pegawai, kesejahteraan dan penggajian pegawai.

- 2) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Ortala mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perusahaan, penanganan masalah hukum, kegiatan hubungan masyarakat, serta penelaahan dan perumusan organisasi dan tata laksana perusahaan.
 - 3) Divisi Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan perusahaan, pengadaan bekal umum, serta tata usaha Direktorat.
- b. Manajer Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan rencana anggaran perusahaan, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan penyusunan laporan realisasi keuangan, serta pelaksanaan administrasi keuangan dan Kas Bank.

Manajer Keuangan terdiri dari ;

- 1) Divisi Tata Usaha Keuangan dan Gedung

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan administrasi dan pengeluaran Kas Bank, pengaturan penerimaan dan penyimpanan uang hasil operasi unit pelaksana dan pendapatan lain, pembuatan bukti penerimaan dan pengeluaran, serta pengaturan

penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang-barang serta pembuatan laporan dan saldo gudang.

2) Divisi Anggaran

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya, investasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan realisasi.

3) Divisi Akuntansi dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan dan pengaturan administrasi pembukuan dan perbendaharaan, pembuatan bukti memorial dan sistem kearsipan, penyusunan laporan perhitungan hasil usaha berkala, tahunan dan laporan lainnya, serta pemeriksaan kebenaran bukti perhitungan yang dikeluarkan, penelitian kelengkapan dokumen dan kebenaran otorisasi.

4. Satuan Pengawasan Intern

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan sesuai rencana program kerja kebijaksanaan yang ditetapkan Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pusat Perencanaan dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang

meliputi aspek organisasi, alat produksi, produksi, sumber daya manusia dan keuangan, melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penyajian data perusahaan, pengkajian dan pengembangan perusahaan, evaluasi kinerja perusahaan, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pusat Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program terpadu atas rencana dan program setiap Direktorat menjadi rencana perusahaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang meliputi aspek organisasi, alat produksi, produksi, sumber daya manusia dan keuangan, melakukan pengkajian pengembangan perusahaan, serta mengumpulkan, mengolah, mengelola dan menyajikan data dan informasi.
- b. Bagian Evaluasi Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan sejalan dengan pengembangan perusahaan, penyusunan laporan perusahaan atas kinerja perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun panjang.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta bergerak dalam bidang transportasi darat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Adapun aktivitas utamanya (tugas pokok) adalah melakukan perusahaan angkutan umum di wilayah daerah khusus ibukota Djakarta dan sekitarnya serta pariwisata yang bermutu tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perusahaan dan penyediaan jasa angkutan umum
- b. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan
- c. Pengelolaan keuangan perusahaan
- d. Pengeelolaan kepegawaian
- e. Pengawasan intern
- f. Penyusunan rencana dan pengembangan perusahaan
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual keuangan perusahaan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Untuk itu guna mengukur keberhasilan suatu perusahaan diperlukan penilaian terhadap kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan suatu analisis terhadap laporan keuangan salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan baik perbandingan secara internal maupun eksternal sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Adapun penilaian kinerja keuangan yang dilakukan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu dengan melakukan penilaian aspek keuangan yang meliputi imbalan kepada pemegang saham (ROE), Imbalan Investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, *Collections periods*, Perputaran persediaan, Perputaran *total asset*, Rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

Dari penilaian kinerja keuangan yang dilakukan perum PPD, untuk melihat perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun penulis melakukan analisis menggunakan teknik *analisis time series* dan *cross section analysis* untuk melihat perkembangannya dibandingkan dengan BUMN sejenis.

4.2.2.1. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan Menggunakan *Time Series Analysis*

Time Series Analysis dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis rasio keuangan secara berkala dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan guna mengevaluasi keadaan masa lalu perusahaan untuk diketahui arah perkembangannya agar perusahaan dapat melakukan tindakan yang sesuai untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan *time series analysis*:

1. Likuiditas

a. *Cash Ratio*

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas+ Bank+ Surat Berharga Jk. Pendek}}{\text{Current Liabilities}}$$

Tabel 6
Cash Ratio Perum PPD
 Tahun 2004-2006
 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Kas dan Setara Kas	<i>Current Liabilities</i>	<i>Cash Ratio</i>(%)
2004	13.584.502	142.180.731	9,55
2005	16.493.121	189.378.077	8,71
2006	53.986.427	210.308.173	25,67

Sumber: Data diperoleh dari Neraca Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel diatas, *cash ratio* tahun 2004 adalah 9,55% yang berarti bahwa terdapat Rp 0,095 aktiva likuid perusahaan yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap Rp 1 kewajiban yang jatuh tempo saat ini. Dengan demikian, *cash ratio* Perum PPD belum begitu baik karena Perum PPD tidak memiliki kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jatuh temponya saat ini.

Pada tahun 2005, *cash ratio* Perum PPD mengalami penurunan dari 9,55% menjadi 8,71%. Penurunan ini disebabkan oleh persentase kenaikan saldo kas dan setara kas lebih kecil (21,41%) dibandingkan persentase kenaikan kewajiban lancar (33,20%) dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan Perum PPD tidak memiliki kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jatuh temponya saat ini.

Pada tahun 2006, *cash ratio* Perum PPD mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 8,71% menjadi 25,67%. Peningkatan ini disebabkan oleh persentase kenaikan kas dan setara kas lebih besar (227,33%)

dibandingkan persentase kenaikan kewajiban lancar yang hanya (11,05%) dari tahun sebelumnya. Walaupun *cash ratio* pada tahun ini mengalami peningkatan, akan tetapi kas yang dimiliki Perum PPD masih belum cukup untuk menutupi kewajiban jatuh tempo saat ini.

b. *Current Ratio*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Tabel 7
Current Ratio Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	<i>Current Asset</i>	<i>Current Liabilities</i>	<i>Current Ratio (%)</i>
2004	21,139.711	142.180.731	14,87
2005	28.650.803	189.378.077	15,13
2006	65.343.055	210.308.173	31,07

Sumber: Data diperoleh dari Neraca Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel diatas, *current ratio* tahun 2004 adalah 14,87% yang berarti bahwa terdapat Rp 0,148 aktiva lancar perusahaan yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap Rp 1 kewajiban yang jatuh tempo saat ini. Dengan demikian, *current ratio* Perum PPD belum begitu baik karena Perum PPD tidak memiliki aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jatuh temponya saat ini.

Pada tahun 2005, *current ratio* Perum PPD mengalami kenaikan dari 14,87% menjadi 15,13%. Kenaikan ini disebabkan

oleh persentase kenaikan saldo kas dan setara kas lebih besar (35,53%) dibandingkan persentase kenaikan kewajiban lancar (33,20%) dari tahun sebelumnya. Peningkatan aktiva lancar ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka.

Pada tahun 2006, *current ratio* Perum PPD mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya, yaitu dari 15,13% menjadi 31,07%. Peningkatan ini disebabkan oleh persentase kenaikan aktiva lancar lebih besar (128,07%) dibandingkan persentase kenaikan kewajiban lancar (11,05%) dari tahun sebelumnya. Walaupun dari tahun ke tahun *current ratio* Perum PPD mengalami peningkatan akan tetapi aktiva lancar yang dimiliki Perum PPD masih belum cukup untuk menutupi kewajiban jatuh tempo saat ini.

2. Solvabilitas

a. Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS/TA)

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 8
Total Modal Sendiri/Total Asset Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Total Modal Sendiri	Total Asset	TMS/TA (%)
2004	(80.344.392)	71.220.554	-112,81
2005	(123.732.641)	75.029.651	-164,91
2006	(127.861.834)	91.830.553	-139,24

Sumber: Data diperoleh dari Neraca Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel diatas, total modal sendiri terhadap *total asset* tahun 2004 adalah -112,81% menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki modal sendiri yang cukup untuk membiayai aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena setiap tahun perusahaan mengalami kerugian sehingga saldo modal sendiri menjadi negatif.

Pada tahun 2005, total modal sendiri terhadap *total asset* mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari -112,81% menjadi -164,91%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan total modal sendiri sebesar 50% dan kenaikan *total asset* sebesar 5,35% dari tahun sebelumnya. Penurunan total modal sendiri terjadi karena perusahaan kembali mengalami kerugian.

Pada tahun 2006, total modal sendiri terhadap *total asset* mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari -164,91% menjadi -139,24%. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun ini perusahaan mengalami kerugian yang lebih kecil dari tahun sebelumnya.

3. Profitabilitas

a. *Return On Equity* (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 9
Return On Equity Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Laba Setelah Pajak	Modal sendiri	ROE (%)
2004	(67.063.786)	231.769.051	-28,94
2005	(43.388.249)	231.769.051	-44,31
2006	(4.129.193)	231.769.051	-1,78

Sumber: Data diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel diatas, ROE yang dihasilkan tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah 28,94%, 44,31%, dan -1,78%. Menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi untuk pemegang saham karena perusahaan mengalami kerugian setiap tahunnya sehingga selalu menghasilkan saldo negatif untuk laba setelah pajak.

b. Return On Investment (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 10
Return On Investment Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	EBIT	Penyusutan	Capital Employed	ROI (%)
2004	(65.972.943)	12.049.019	71.220.554	-75,71
2005	(38.012.362)	8.691.848	75.029.651	-62,25
2006	(3.751.439)	2.258.090	91.830.553	-6,54

Sumber: Data diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel di atas, ROI yang dihasilkan tahun 2004, 2005, dan 2006 adalah -75,71, -62,25, dan -49,13. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap investasi aktiva yang ditanamkan perusahaan tidak mendapatkan timbal baliknya (laba) sehingga laba sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan bersaldo negatif yang berarti perusahaan terus mengalami kerugian.

4. Aktivitas

a. *Collection Periods* (CP)

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Tabel 11
Collection Periods Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Total Piutang Usaha	Total Pendapatan Usaha	CP (Hari)
2004	2.753.518	85.113.413	11,81
2005	403.770	64.426.312	2,29
2006	1.134.615	92.334.789	4,49

Sumber: Data diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel di atas, *collection periods* tahun 2004 adalah 12 hari menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata waktu kurang lebih 12 hari untuk mengubah piutang usaha menjadi kas. Dengan demikian, Perum PPD memiliki waktu yang relatif pendek dalam penagihan piutangnya dan hal ini memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Pada tahun 2005, *collection periods* mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 12 hari menjadi 2 hari. Hal ini disebabkan oleh turunnya piutang usaha dan turunnya total pendapatan usaha.

Pada tahun 2006, *collection periods* mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 2 hari menjadi 5 hari. Hal ini disebabkan oleh persentase kenaikan piutang usaha (181%) lebih besar dibandingkan persentase kenaikan pendapatan usaha (9,01%).

b. Perputaran Persediaan (PP)

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel 12
Perputaran Persediaan Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Total Persediaan	Total Pendapatan Usaha	PP (Hari)
2004	1.786.647	85.113.414	7,66
2005	1.732.420	64.426.312	9,81
2006	1.716.723	92.334.789	6,79

Sumber: Data diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perum PPD per 31 Desember 2004 s.d 2006

Berdasarkan tabel di atas, perputaran persediaan tahun 2004 adalah 8 hari yang berarti waktu rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang pada tahun 2005 selama 8 hari,

Pada tahun 2005, perputaran persediaan semakin efisien dibandingkan tahun 2004 yaitu dari 8 hari menjadi 10 hari. Hal ini

disebabkan terjadinya penurunan persediaan sebesar 3,03% dan penurunan pendapatan usaha sebesar 24,30%.

Pada tahun 2006, perputaran persediaan mengalami penurunan yaitu dari 10 hari menjadi 7 hari. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan persediaan sebesar 0,9%, sedangkan pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 43,32%.

c. *Total Asset Turn Over*

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 13
Total Asset Turn Over Perum PPD
Tahun 2004-2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Capital Employed	TATO (%)
2004	89.760.697	71.220.554	126,03
2005	68.108.123	75.029.651	90,77
2006	98.591.904	91.830.553	107,36

Sumber: Data diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perum PPD per 31 Desember 2003 s.d 2005

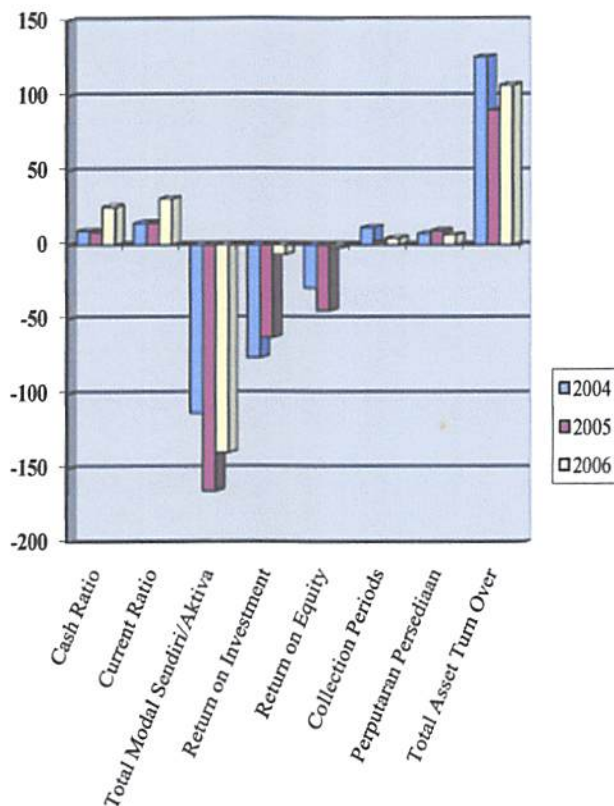
Berdasarkan tabel diatas, *total asset turn over* tahun 2004 adalah 126,03% menunjukkan bahwa aktivitas aktiva perusahaan untuk menciptakan penjualan sebanyak 1,3 kali dalam satu tahun.

Pada tahun 2005, *total asset turn over* mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004 yaitu dari 126,03% menjadi 90,77%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar 24,12%, sedangkan *capital employed* mengalami peningkatan sebesar 5,35%.

Pada tahun 2006, *total asset turn over* mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2005 yaitu dari 90,77% menjadi 107,36%. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 44,64% dan kenaikan *capital employed* sebesar 21,33%.

Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan perkembangan tiap-tiap rasio keuangan yang menjadi indikator kinerja keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta secara keseluruhan dari periode 2004 sampai dengan 2006:

Gambar 2
 Grafik Perkembangan Rasio Keuangan
 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
 Periode 2004 s.d 2006



Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa rasio-rasio keuangan Perum PPD dari tahun 2004 ke tahun 2005 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005, dari segi likuiditas Perum PPD tidak baik, hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan yang signifikan yang berarti perusahaan masih belum memiliki aktiva likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dari segi solvabilitasnya Perum PPD semakin menurun hal ini disebabkan oleh banyaknya hutang kepada pihak luar serta terjadinya kerugian

sehingga asset yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya. Dari segi profitabilitasnya, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi kinerjanya masih buruk karena *return on investment* yang dihasilkan masih negatif dan *return on equity* juga berasal dari laba setelah pajak yang negatif. Jadi Perum PPD tidak bisa memberikan timbal balik kepada pemegang sahamnya dan tidak ada hasilnya dari investasi aktiva yang dilakukan perusahaan. Sedangkan dari segi aktivitasnya Perum PPD mengalami penurunan bisa terlihat dari perputaran persediaan dan *total asset turn over* yang menurun.

Rasio-rasio keuangan Perum PPD dari tahun 2005 ke tahun 2006 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini terutama terjadi pada rasio likuiditas (*cash ratio, current ratio*), profitabilitas (*return on investment* dan *return on equity*) dan aktivitas (*collection periods* dan *total asset turn over*). Peningkatan nilai-nilai rasio pada tahun 2006 ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Perum PPD mulai membaik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih mengalami kerugian.

4.2.1.2. Penilaian Kinerja Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan Menggunakan Cross Section Analysis

Selain melakukan perbandingan rasio keuangan secara internal (*time series analysis*) penulis juga melakukan perbandingan eksternal (*cross Section analysis*).

Cross Section Analysis merupakan suatu analisis dengan cara membandingkan hasil analisis rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama dan dalam waktu yang sama.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan *cross section analysis*:

Tabel 14
Kinerja Keuangan Perum PPD
Relatif Terhadap BUMN Sejenis

Rasio Keuangan	Perum PPD			BUMN Sejenis			Kriteria		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Likuiditas									
Cash Ratio	9,55	8,71	25,67	28,30	30,80	31,24	KB	KB	KB
Current Ratio	14,87	15,13	31,07	45,87	72,28	46,43	KB	KB	KB
Solvabilitas									
Total Modal Sendiri/ Total Asset	(112,81)	(164,91)	(139,24)	47,21	50	41,10	KB	KB	KB
Profitabilitas									
Return on Investment	(75,71)	(62,25)	(6,54)	10,23	12,04	15,38	KB	KB	KB
Return on Equity	(28,94)	(44,31)	(1,78)	(24,17)	(21,25)	(10,54)	KB	KB	B
Aktivitas									
Collection Periods	11,81	2,29	4,49	5,78	4	4,53	KB	B	B
Inventory Turn Over	7,66	9,81	6,79	7,83	9	6,89	B	B	B
Total Asset Turn Over	126,03	90,77	107,36	110,59	117,83	153,96	B	KB	KB

Keterangan :

B : Baik → Rasio keuangan Perum PPD sama atau lebih besar dari BUMN sejenis

KB : Tidak Baik → Rasio keuangan Perum PPD lebih kecil dari BUMN sejenis

Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa kinerja keuangan Perum PPD relatif terhadap BUMN sejenis pada tahun 2004 menunjukkan kurang baik karena hampir semua nilai rasio-rasio keuangan Perum PPD berada dibawah rasio keuangan BUMN sejenis.

Pada tahun 2005, kinerja keuangan Perum PPD relatif terhadap BUMN sejenis juga menunjukkan kurang baik karena hampir keseluruhan hasil dari rasio keuangan Perum PPD berada dibawah rasio keuangan BUMN sejenis.

Pada tahun 2006, kinerja keuangan Perum PPD relatif terhadap BUMN sejenis menunjukkan kurang baik, akan tetapi pada tahun ini *Return on Equity* Perum PPD mengalami peningkatan dibandingkan BUMN sejenis walaupun masih negatif, hal ini disebabkan kerugian yang terjadi pada tahun ini relatif kecil.

4.2.2. Dampak Penilaian Kinerja Keuangan Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Pada dasarnya setiap BUMN/ BUMD mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap kinerja keuangannya. Hal ini dilakukan guna melihat perkembangannya dari tahun ke tahun serta strategi-strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Kelangsungan hidup perusahaan bagi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) adalah kemampuan Perum PPD untuk tetap bertahan sebagai perusahaan BUMN. Untuk mengetahui kelangsungan hidupnya, maka dilakukan skoring terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat

kesehatan Badan Usaha Milik Negara sebagai tolak ukur. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 15
Total Skoring

Rasio Keuangan	Periode yang berakhir 31 Desember					
	2004		2005		2006	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
Cash Ratio	9,55	1	8,71	1	25,67	2,5
Current Ratio	14,87	0	15,13	0	31,07	0
TMS/ TA	(112,81)	0	(164,91)	0	(139,24)	0
ROI	(75,71)	0	(62,25)	0	(6,54)	0
ROE	(28,94)	1	(44,31)	1	(1,78)	1
Collection Periods	11,81	4	2,29	4	4,49	4
Inventory Turn Over	7,66	4	9,81	4	6,79	4
TATO	126,03	4	90,77	3	107,36	3,5
Total Skor		14		13		15
Kualifikasi	TIDAK SEHAT "CCC"		TIDAK SEHAT "CCC"		KURANG SEHAT "B"	

Berdasarkan tabel di atas, untuk periode 31 Desember 2004 dengan total skor 14 dan untuk periode 31 Desember 2005 dengan total skor 13 berarti Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta berada pada range $10 < TS \leq 15$ (CCC). Range tersebut berada pada kategori tidak sehat untuk aspek keuangannya, berarti dapat dikatakan bahwa Perum PPD memiliki kondisi kelangsungan hidup yang tidak baik atau terancam.

Sedangkan untuk periode 31 Desember 2006 menunjukkan skor 15 berarti Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta berada pada range $15 < TS \leq 20$ (B). Range tersebut berada pada kategori kurang sehat level ahir dalam arti mendekati tidak sehat untuk aspek keuangannya. Dengan adanya peningkatan nilai skor tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi

kelangsungan hidup Perum PPD berangsur membaik, walaupun masih berada dalam kategori kurang sehat.

Oleh karena itu penilaian kinerja keuangan sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Berikut ini adalah hasil dari pembahasan dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Peum Pengangkutan Penumpang Djakarta setiap periodenya dari tahun 2004 sampai dengan 2006:

1. Periode 31 Desember 2004

Tabel 16

Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta 31 Desember 20004

Penilaian kinerja Keuangan	Kriteria	
Likuiditas		
Cash Ratio	Kurang Baik	
Current Ratio	Kurang Baik	
Solvabilitas		
Total Modal Sendiri/ Total Asset	Kurang Baik	
Profitabilitas		
ROI	Kurang Baik	
ROE	Kurang Baik	
Aktivitas		
Collection Periods	Kurang Baik	
Inventory Turn Over	Baik	
Total Asset Turn Over	Baik	
Kelangsungan Hidup	Level	Kriteria
Total skor = 14	CCC	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta pada periode 31 Desember 2004 cenderung Kurang baik karena berada dibawah rata-rata kompetitorinya. Hal ini berdampak pada kondisi kelangsungan hidup

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dikategorikan tidak sehat Level CCC, sehingga dapat diprediksikan bahwa Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta akan kesulitan untuk melanjutkan kegiatan operasi pada periode berikutnya.

Kelangsungan hidup Perum PPD baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat buruk. Dari jangka pendeknya, terlihat dari *cash ratio* dan *current ratio* yang sangat kecil yaitu sebesar 9,55 dan 14,87. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik dengan kas maupun aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk kelangsungan hidup jangka panjangnya, perum PPD juga mengalami kesulitan untuk terus beroperasi, dapat dilihat dari total modal sendiri yang bersaldo negatif, hal ini diakibatkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus sehingga total saldo laba yang terus bersaldo negatif akibatnya berpengaruh terhadap total modal sendiri.

2. Periode 31 Desember 2005

Tabel 17
Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta 31 Desember 20005

Penilaian kinerja Keuangan	Kriteria	
Likuiditas		
Cash Ratio	Kurang Baik	
Current Ratio	Kurang Baik	
Solvabilitas		
Total Modal Sendiri/ Total Asset	Kurang Baik	
Profitabilitas		
ROI	Kurang Baik	
ROE	Kurang Baik	
Aktivitas		
Collection Periods	Baik	
Inventory Turn Over	Baik	
Total Asset Turn Over	Kurang Baik	
Kelangsungan Hidup	Level	Kriteria
Total skor = 13	CCC	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta pada periode 31 Desember 2005 hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu cenderung kurang baik karena masih berada di bawah kompetitornya. Hal ini berdampak

pada kondisi kelangsungan hidup Perum PPD dikategorikan CCC pada level tidak sehat dengan total skor 13, sehingga dapat diprediksikan Perum PPD sangat kesulitan untuk melanjutkan kegiatan operasi pada periode berikutnya.

Kelangsungan hidup jangka pendek dan jangka panjangnya masih sama dengan periode sebelumnya, perusahaan tidak memiliki kas dan keseluruhan aktiva yang cukup untuk membiayai kewajiban lancarnya, walaupun *current ratio* mengalami peningkatan yaitu dari 14,87% menjadi 15,17% akan tetapi kenaikan ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja keuangan perusahaan. Sama halnya dengan kewajiban jangka pendeknya, kelangsungan hidup jangka panjangnya juga masih sama dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena perusahaan masih mengalami kerugian seperti tahun-tahun sebelumnya.

3. Periode 31 Desember 2006

Tabel 18

Hasil Penilaian Kinerja Keuangan dan Kondisi Kelangsungan Hidup
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta 31 Desember 20006

Penilaian kinerja Keuangan	Kriteria	
Likuiditas		
Cash Ratio	Kurang Baik	
Current Ratio	Kurang Baik	
Solvabilitas		
Total Modal Sendiri/ Total Asset	Kurang Baik	
Profitabilitas		
ROI	Kurang Baik	
ROE	Baik	
Aktivitas		
Collection Periods	Baik	
Inventory Turn Over	Baik	
Total Asset Turn Over	Kurang Baik	
Kelangsungan Hidup	Level	Kriteria
Total skor = 15	B	Kurang Sehat

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Perum PPD pada periode 31 Desember 2006 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kinerja keuangan Perum PPD cenderung kurang baik, walaupun *return on equity* Perum

PPD lebih unggul daripada kompetitornya namun secara keseluruhan Perum PPD masih berada di bawah kompetitornya. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup Perum PPD dikategorikan kurang sehat pada level B dengan total skor 15 point, sehingga dapat diprediksikan kelangsungan hidup Perum PPD masih terancam sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatan operasinya pada periode berikutnya.

Kelangsungan hidup jangka pendek dan panjangnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tidak baik karena Perum PPD tidak mempunyai kas dan *total asset* yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk kelangsungan hidup jangka panjangnya Perum PPD juga masih sama dengan periode sebelumnya dan penyebabnya juga masih sama yaitu perusahaan masih mengalami kerugian setiap periodenya, sehingga perusahaan tidak bisa membayar kewajiban jangka panjangnya.

Dari hasil penilaian kinerja keuangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan yang dilakukan Perum PPD belum baik sehingga berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan yang terancam. Dampak tersebut dapat dilihat dari :

- Perum PPD mengalami kerugian dari tahun 1982 s.d tahun 2006. Akumulasi kerugian yang diderita Perum PPD sampai tahun 2006 mencapai Rp 473.967.187.559
- Total pendapatan usaha masih kurang mencukupi biaya operasioal yang dikeluarkan perusahaan, karena pendapatan

operasi bus masih sangat kecil, hal ini disebabkan Perum PPD masih menggunakan sarana/ bus yang tidak layak pakai atau umur ekonomisnya sudah hampir habis dan tidak ada penambahan jumlah bus sehingga bus yang beroperasi kurang optimal dan hal ini berpengaruh terhadap pendapatan operasi bus.

- Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan relatif besar, yaitu lebih dari 50% dari pendapatan usaha digunakan untuk biaya operasional. Hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih besar dari kapasitas yang diperlukan sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan sangat besar.
- Total Aktiva lancar yang dimiliki Perum PPD belum cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga *current rationya* selalu bernilai kecil.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pihak manajemen Perum PPD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar perusahaan tetap bisa mempertahankan kelangsungan hidup kedepannya adalah :

1. Perusahaan berusaha memperoleh keuntungan dengan memperkecil biaya operasional yaitu dengan mengurangi sumber daya manusia/ melakukan pemberhentian kerja atau mengadakan pensiun dini sehingga biaya-biaya operasional

kedepannya akan lebih sedikit dan diharapkan perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

2. Biaya-biaya yang digunakan dalam rangka mengurangi sumber daya manusia tersebut, yaitu untuk membayar uang pesangon pegawai bersumber dari *divestasi asset* sedangkan sebagian besar asset yang dimiliki perusahaan tidak memiliki sertifikat sehingga memerlukan waktu yang lama karena mengalami hambatan tersebut. Namun hanya ini yang dapat Perum PPD lakukan untuk membayar uang pesangon karena perusahaan sudah tidak mendapat subsidi lagi dari pemerintah.

Tindakan-tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tim auditor, dimana dari kedua laporan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja keuangan Perum PPD kurang baik sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Perum PPD yang dikategorikan tidak sehat pada level "CCC" untuk tahun 2004 dan 2005 serta kategori kurang sehat pada level "B" untuk tahun 2006.

Hal ini menandakan bahwa pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut belum berpengaruh banyak karena kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun masih kurang baik yang artinya penilaian kinerja keuangan yang dilakukan kurang baik yang mengakibatkan kelangsungan hidup Perum PPD terancam sehingga perusahaan

mengalami kesulitan untuk melanjutkan kegiatan operasinya pada periode berikutnya karena perusahaan hanya mengandalkan *divestasi asset* saja. Jadi, apabila *divestasi asset* memakan waktu yang cukup lama maka kinerja keuangan perusahaan juga akan sulit membaik sehingga dapat dipastikan kelangsungan hidup Perum PPD terancam.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan pada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), maka dapatlah penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai penilaian kinerja keuangan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Perum PPD untuk tahun 2004 sampai 2006 tidak baik karena sebagian besar rasio keuangan yang menjadi ukuran kinerja keuangan yang dihasilkan perusahaan cenderung berada di bawah rata-rata BUMN sejenis.
2. Untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan maka dilakukan skoring terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Dari hasil skoring tersebut menunjukkan bahwa kondisi kelangsungan hidup Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) pada tahun 2004 dan 2005 tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kesehatan perusahaan yang tidak baik yaitu berada pada level CCC (tidak sehat) dengan masing-masing skor 14 dan 13 point. Walaupun tahun 2006 kondisi kesehatan perusahaan mengalami peningkatan dari level CCC (tidak sehat) menjadi Level B (kurang sehat) akan tetapi, kelangsungan hidup perusahaan masih kurang baik karena

berdasarkan penilaian tingkat kesehatan BUMN tersebut perum PPD masih berada dalam kategori kurang sehat.

3. Berdasarkan pembahasan dampak penilaian kinerja keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan yang dilakukan Perum PPD masih kurang baik, ini terlihat dari kerugian yang dialami perusahaan dari tahun ke tahun serta biaya operasional yang relatif besar sehingga total pendapatan usaha tidak bisa menutupi biaya tersebut. Hal tersebut berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja keuangan memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
4. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pihak manajemen Perum PPD dalam rangka melakukan perbaikan terhadap kinerja keuangannya yaitu dengan cara memperkecil biaya operasional dengan mengurangi sumber daya manusia, dengan melakukan *divestasi asset* untuk menanggulangi biaya persangan pegawai. hal ini adalah satu-satunya jalan yang ditempuh Perum PPD mengingat perusahaan sudah tidak mendapatkan subsidi lagi dari pemerintah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis dapat memberikan saran kepada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta sebagai berikut:

1. Perum PPD disarankan untuk memperbaiki kinerja keuangannya yang tidak sehat, dengan tidak hanya melakukan *divestasi asset* karena *divestasi asset* memerlukan waktu yang lumayan lama sehingga akan menghambat perbaikan kinerja keuangannya. Adapun tindakan yang seharusnya dilakukan Perum PPD adalah dengan mencari sumber modal dari pihak lain guna menutupi biaya uang pesangon yang harus dikeluarkan perusahaan.
2. Perum PPD hendaknya melengkapi Aktiva tetap dan Bangunan yang dimiliki dengan sertifikat hal ini guna mempercepat proses pencairan dana baik hendak dijual maupun untuk dijaminkan.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan														
		Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt
1	Pengajuan Judul	**														
2	Studi Pustaka		***	****												
3	Pembuatan Makalah Seminar				**	****										
4	Seminar						*									
5	Pengesahan						**									
6	Pengumpulan Data							***								
7	Pengolahan Data							****	****							
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								**	****	****	****	****	****	****	*
9	Sidang Skripsi															**
10	Penyempurnaan Skripsi															***
11	Pengesahan															***

Keterangan: Tanda (*) menunjukkan satuan waktu (minggu)

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Edisi 5. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Andi. Yogyakarta.
- Dewi Astuti. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Fraser, Lyn M., dan Ailen Ormiston. 2004. *Memahami Laporan Keuangan*. Edisi 6. Alih Bahasa: Sam Setyautama. PT Indeks. Jakarta.
- G. Sugiyarso dan F. Winarni. 2006. *Manajemen Keuangan (Pemahaman Laporan Keuangan, Pengelolaan Aktiva, Kewajiban dan Modal, setra Pengukuran Kinerja Perusahaan)*. Cetakan Kedua. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10. Rajawali Pers. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hongren T. Charles., Walter T. Horison Jr., and Linda Smith Bamber. 2006. *Akuntansi*. Alih Bahasa: Barlian Muhammad. Penyunting Bahasa: Sam Setyautama. Indeks. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. *Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan*

Keown, Arthur J., Jhon D. Martin, J. William Petty, David F. Scott, Jr. 2004. *Manajemen Keuangan Prinsip-Prinsip Dan Aplikasi*. Edisi 1. Alih Bahasa: Haryandini. PT Indeks Kelompok Gramedia Anggota. Jakarta.

Lukas Setya Atmaja. 2008. *Teori dan Praktik Manajemen*. Andi. Yogyakarta.

Lukman Syamsudin. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Rico Lesmana dan Rudy Surjanto. 2004. *Financial Performance Analyzing (Pedoman Menilai Kinerja Keuangan Untuk Perusahaan Tbk., Yayasan, BUMN, BUMD dan Organisasi Lainnya)*. PT Gramedia. Jakarta.

Siswanto sutojo dan F. Kleinsteuber. 2004. *Manajemen Keuangan Untuk Non Eksekutif Keuangan*. Damar. Jakarta.

Toto Prihadi. 2007. *Mudah Memahami Laporan Keuangan*. Penyunting: Hari Wahyudi. PPM. Jakarta.

Van Horne, James C., and John M. Wachowicz, JR. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Buku 1. Edisi 12. Penerjemah: Dewi Fitriyasaki dan Deny Arnos Kwary. Salemba Empat. Jakarta.

Warren S. Carll., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Buku 2. Edisi 21. Penerjemah : Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan. Salemba Empat. Jakarta.

Weaver C. Samuel., dan J. Fred Weston. 2004. *Keuangan dan Akuntansi Untuk Manajer Non Keuangan*. Pengalih Bahasa: Emil Salim. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

Wild, John J., K.R Subramanyam and Robert F. Hasley. 2005. *Analisa Laporan Keuangan*. Buku 1. Edisi 8. Alih bahasa: Yanivi S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap. Salemba Empat. Jakarta.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eka Merdekawati

NPM : 022105130

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa saya telah menghubungi instansi atau perusahaan yang akan saya jadikan objek penelitian dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupannya untuk menerima dilakukan penelitiannya tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima :

Nama : Supriyono

Jabatan : Kepala Divisi Kepegawaian

Nama Instansi atau Perusahaan : Perum PPD

Alamat Instansi atau Perusahaan : Jalan DI. Panjaitan No. 1, Jakarta Timur

Judul Penelitian : Dampak Penilaian Kinerja Keuangan terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan Pada Perum
Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Oktober 2009

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is a 6000 Rupiah meter stamp, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '6000', 'Juli 2009', and 'METER TEMPEL'.

Eka Merdekawati



PERUSAHAAN UMUM
"PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA"

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1, Jakarta Timur
Telp. (021) 68327384 Fax. (021) 8501047

SURAT KETERANGAN

Nomor : *2749* /MU/IX/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Manajer Umum Perusahaan Umum "Pengangkutan Penumpang Djakarta" (Perum PPD) menerangkan bahwa:

Nama : EKA MERDEKAWATI
NPM : 022105130
Jurusan : Akuntansi S1

Menerangkan bahwa yang bersangkutan siswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan telah melaksanakan **RISET** di Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) yang dimulai dari tanggal 7 September 2009 s/d 11 September 2009 dengan hasil **baik**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 September 2009

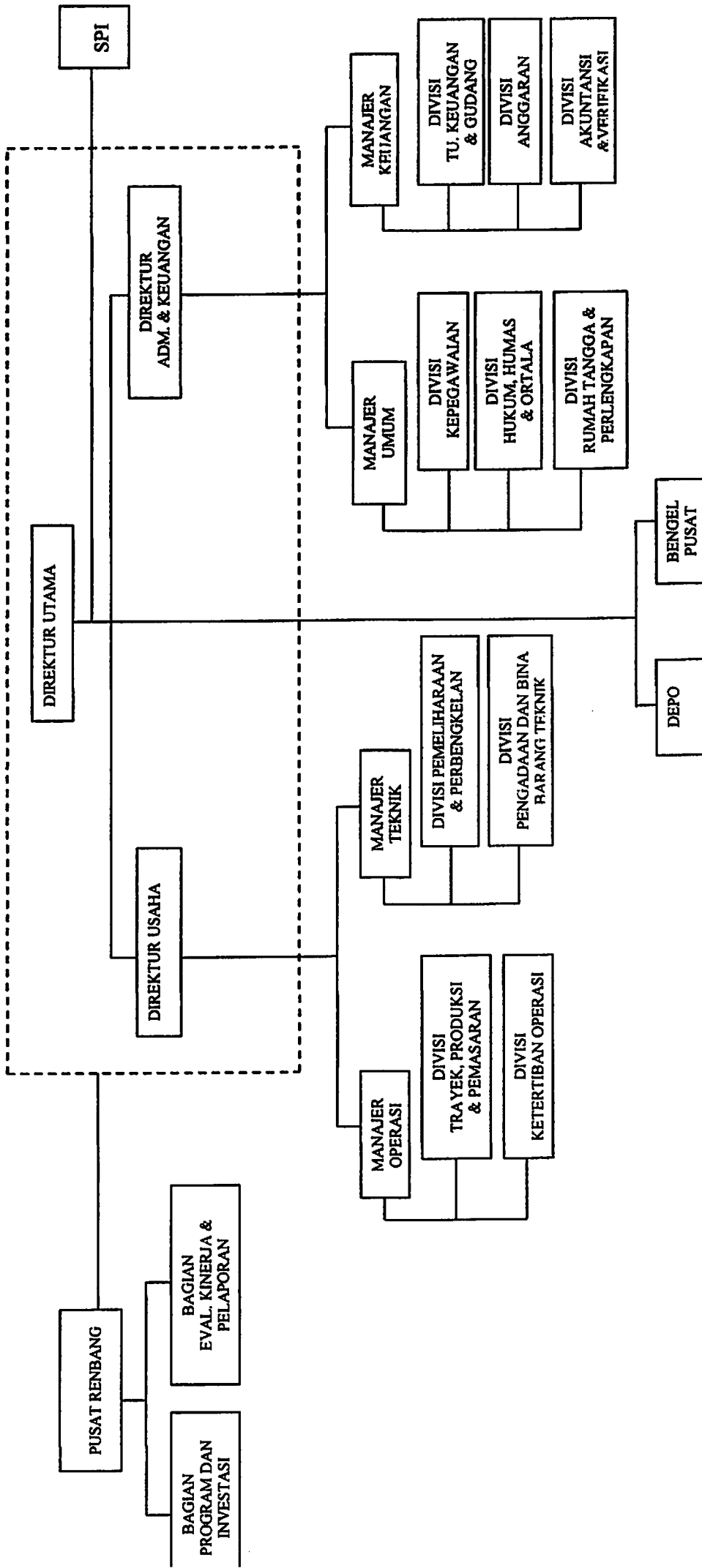
PERUSAHAAN UMUM
PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
MANAJER UMUM

u.d
KEPALA DIVISI KEPEGAWAIAN,



SUPRIYONO

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PPD)



PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2006</u>	<u>31 Des 2005</u>	<u>31 Des 2004</u>
AKTIVA				
Aktiva lancar				
Kas dan Setara Kas	3b, 4, 5	53.986.427.105	16.493.120.858	13.584.502.247
Piutang	7	5.237.170.386	4.427.537.023	3.942.549.716
Piutang lain-lain	8	4.170.319.860	3.900.766.738	2.386.316.614
Penyisihan piutang	9	(4.102.555.070)	(4.023.767.125)	(1.189.031.826)
Uang muka	10	4.145.098.342	5.911.924.596	414.267.450
Pendapatan yang masih harus diterima	11	156.890.234	174.980.100	207.237.550
Biaya dibayar dimuka	12	32.980.453	33.821.423	7.221.851
Persediaan	3d, 13	<u>1.716.723.200</u>	<u>1.732.419.667</u>	<u>1.786.647.491</u>
Jumlah Aktiva Lancar		<u>65.343.054.510</u>	<u>28.650.803.281</u>	<u>21.139.711.093</u>
Investasi	14	187.600.000	187.600.000	0
Aktiva Tetap				
	3e, 15			
Tanah		8.450.987.612	10.995.655.274	15.000.069.024
Bangunan/Emplasemen		31.689.245.109	32.044.978.912	32.984.674.262
Kendaraan angkutan		111.376.263.275	111.376.263.275	111.376.263.275
Kendaraan dinas		1.126.680.268	1.126.680.268	1.126.680.268
Perlengkapan Bengkel		9.124.778.510	8.386.410.960	11.274.425.290
Inventaris		<u>3.560.178.901</u>	<u>3.039.495.790</u>	<u>2.846.987.340</u>
Nilai Perolehan		165.328.133.675	166.969.484.479	174.609.099.459
Akumulasi Penyusutan		<u>(138.905.372.254)</u>	<u>(137.405.266.234)</u>	<u>(135.683.363.007)</u>
Nilai Buku		<u>26.422.761.421</u>	<u>29.564.218.245</u>	<u>38.925.736.452</u>
Aktiva Pajak Tangguhan	16	394.733.428	4.234.441.414	4.622.107.669
Aktiva Lain-lain				
	17			
Aktiva Lain-lain		31.170.319.860	46.735.676.466	43.759.107.390
Penyisihan Aktiva lain-lain		<u>(35.240.519.870)</u>	<u>(34.343.088.615)</u>	<u>(37.226.108.677)</u>
		<u>4.070.200.010</u>	<u>12.392.587.851</u>	<u>6.532.998.714</u>
JUMLAH AKTIVA		<u>91.830.553.349</u>	<u>75.029.650.791</u>	<u>71.220.553.927</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2006</u>	<u>31 Des 2005</u>	<u>31 Des 2004</u>
KEWAJIBAN DAN MODAL				
Kewajiban Lancar				
Hutang usaha	19	30.740.189.060	23.268.542.798	21.729.573.048
Hutang pajak	20	13.356.025.211	9.269.094.214	7.753.808.358
Biaya yang masih harus dibayar	21	15.900.450.120	10.691.381.644	6.638.586.830
Pendapatan diterima dimuka	22	37.702.168.921	30.028.831.191	28.530.890.378
Hutang diluar usaha	23	30.717.088.174	36.808.982.733	11.962.951.176
Hutang kepada PT Angkasa Pura II	24	50.080.211.600	47.395.033.784	35.000.000.000
Hutang RDI	25	17.021.826.512	20.589.081.248	19.029.835.308
Hutang BBN Kendaraan Angkutan	26	14.790.213.700	11.327.130.000	11.535.086.250
Jumlah kewajiban lancar		210.308173.298	189.378.077.612	142.180.731.347
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	27	9.384.214.250	9.384.214.250	9.384.214.250
Ekuitas	28			
Modal		231.769.050.725	231.769.050.725	231.769.050.725
Penyertaan Modal Negara		104.435.706.002	104.435.706.002	104.435.706.002
Modal donasi		97.500.000	97.500.000	97.500.000
Cadangan		763.200.627	763.200.627	763.200.627
Selisih penilaian kembali Aktiva tetap per 1 Januari 1987		9.039.896.006	9.039.896.006	9.039.896.006
Saldo laba (rugi) s.d tahun lalu		(469.837.994.431)	426.449.745.031)	359.385.959.477)
Laba (Rugi) tahun berjalan		(4.129.193.128)	(43.388.249.400)	(67.063.785.554)
Jumlah Ekuitas		(127.861.834.199)	(123.732.641.071)	(80.344.391.672)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		91.830.553.349	75.029.650.791	71.220.553.927

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2006</u>	<u>31 Des 2005</u>	<u>31 Des 2004</u>
Pendapatan Usaha	29			
Angkutan Lintas		79.492.071.680	59.538.246.980	80.038.379.792
angkutan rombongan dan wisata		12.721.502.230	4.887.251.655	4.841.597.606
Pendapatan Jasa BP3BK		121.215.000	813.000	233.436.195
Jumlah Pendapatan Usaha		92.334.788.910	64.426.311.635	85.113.413.593
Biaya Usaha				
Biaya langsung	30	70.530.210.595	74.030.528.295	94.157.019.402
Biaya tidak langsung	31	14.123.177.468	16.977.682.395	19.031.588.477
Biaya Administrasi dan Umum	32	35.507.184.256	39.807.732.992	38.531.423.478
Jumlah Biaya Usaha		120.160.572.319	130.815.943.681	151.720.031.357
Laba (Rugi) Usaha		(27.825.783.409)	(66.389.632.046)	(66.606.617.764)
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha				
Pendapatan diluar usaha	33	6.257.114.600	3.681.811.335	4.647.282.165
Biaya diluar usaha	34	8.726.410.150	(14.677.740.015)	(2.534.597.655)
Jumlah Pendapatan dan Biaya diluar Usaha		(2.469.295.550)	(10.995.928.680)	2.112.684.510
Pos Luar Biasa				
Penjualan aktiva tetap	35	31.572.116.127	59.297.287.327	0
Biaya Pesangon pegawai	36	(5.119.126.310)	(24.912.309.746)	(3.252.828.992)
Jumlah Pos Luar Biasa		26.452.989.817	34.384.977.581	(3.252.828.992)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(3.842.089.142)	(43.000.583.145)	(67.746.762.246)
Pajak Penghasilan Badan	38	0	0	0
Penghasilan (beban) Pajak Tangguhan	37	(287.103.986)	(387.666.255)	682.976.692
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(4.129.193.128)	(43.388.249.400)	(67.063.785.554)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} : \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)		Skor	
		Infra	Non Infra
18	< ROI	10	15
15	< ROI ≤ 18	9	13,5
13	< ROI ≤ 15	8	12
12	< ROI ≤ 13	7	10,5
10,5	< ROI ≤ 12	6	9
9	< ROI ≤ 10,5	5	7,5
7	< ROI ≤ 9	4	6
5	< ROI ≤ 7	3,5	5
3	< ROI ≤ 5	3	4
1	< ROI ≤ 3	2,5	3
0	< ROI ≤ 1	2	2
	ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)		Skor	
		Infra	Non Infra
	x ≥ 35	3	5
25	≤ x < 35	2,5	4
15	≤ x < 25	2	3
10	≤ x < 15	1,5	2
5	≤ x < 10	1	1
0	≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <=35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <=25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <=6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <=3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <=1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
 - Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
 - Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II/3



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
- a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
- a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008